

---

## **PEMBERDAYAAN SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI PEKON KILUAN NEGRI, KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG**

**Agustina Multi Purnomo<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program S3 Sosiologi Universitas Indonesia, Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor

### **Abstrak**

Konsep ekowisata menekankan pada pengelolaan wisata berbasis masyarakat lokal dengan salah satu tujuan utama yaitu pemberdayaan sosial masyarakat lokal. Pemberdayaan sosial mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh Scheyvens (1999) meliputi partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata, alokasi hasil pengembangan ekowisata untuk masyarakat lokal dan ada tidaknya indikasi kegagalan pengembangan ekowisata. Berdasarkan kerangka ini, penelitian di Pekon Kiluan Negri dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, pengamatan dan *focus group discussion*. Penelitian dilakukan selama satu bulan pada masa sepi dan ramai kunjungan. Masyarakat Pekon Kiluan Negri diambil sebagai batasan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan secara umum telah adanya partisipasi masyarakat, alokasi hasil pengembangan ekowisata untuk masyarakat, dan penilaian negatif dari masyarakat pada unsur kegagalan pemberdayaan sosial. Partisipasi belum melibatkan perempuan, anak, unsur masyarakat yang tidak terlibat dalam LSM, warga bukan penyedia layanan wisata, dan warga non aparat desa atau tokoh desa. Keterbukaan alokasi hasil pengembangan ekowisata masih dipertanyakan peruntukannya oleh masyarakat pada kelompok ini. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya upaya melibatkan masyarakat secara menyeluruh dan transparansi pengelolaan dana hasil pengembangan ekowisata.

Kata Kunci: Pemberdayaan sosial, ekowisata, Teluk Kiluan, Lampung

## **SOCIAL EMPOWERMENT ON ECOTOURISM DEVELOPMENT IN KILUAN NEGRI VILLAGE, TENGAMUS REGENCY, PROVINCE OF LAMPUNG**

### **Abstract**

The concept of ecotourism emphasis on local community-based tourism management with one of its primary purpose is social empowerment of local communities. Social empowerment refers to the approach taken by Scheyvens (1999) include the participation of local communities in the management of ecotourism, the allocation results ecotourism development for the local community, and no indication of a failure of ecotourism development. Based on the framework, research at the Negri Kiluan Village was conducted with qualitative methods and data collection techniques interview, observation, and focus group discussion. The study was conducted for one month during the low and high season. Citizens of Kiluan Negri Village have taken as the unit analysis of local communities. The result showed in general there was community participation, allocation result ecotourism development for the community, and the community's negative assessment to the failure element. However, local community participation has not involving women, children, and citizens who are not involved in NGOs, not village officials and village leaders, and not travel service providers. Transparency of the allocation of the result of the ecotourism development was still questioned by the people in this group. It showed the need for the involvement of the whole citizens and transparency in the management of ecotourism development proceeds.

Keywords: social empowerment, ecotourism, Teluk Kiluan, Lampung

## PENDAHULUAN

Sejak tahun 1980-an agenda politik lingkungan hidup mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Isu yang kemudian menjadi kesepakatan dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil di mana paradigma pembangunan berkelanjutan menjadi agenda politik pembangunan di dunia. Pelestarian sumberdaya alam (SDA) merupakan salah satu isu sentral pembangunan berkelanjutan. Sebagai upaya perlindungan SDA maka pemerintah Indonesia menerapkan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Respon terhadap peraturan tersebut adalah konsep pariwisata yang ramah lingkungan hingga lahirnya konsep ekowisata. Peraturan pemerintah yang menjadi pedoman, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1998 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat, dan Taman Wisata Alam, serta Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Jenis PNBP yang Berlaku Pada Dephutbun, Keputusan Menteri Kehutanan No. 446/KPTS-II/1996 Tentang Tata Cara Permohon Pemberian & Pencabutan Izin Pengusaha Pariwisata Alam.

Beberapa penelitian terdahulu tentang ekowisata di Indonesia dari rentang tahun 1994 hingga 2010 menunjukkan kecenderungan focus penelitian pada kelayakan lokasi, pengembangan lokasi, pengelolaan ekowisata dan pelibatan masyarakat setempat.

Penekanan focus penelitian pada kelayakan lokasi sebagai penyelenggara ekowisata pada hasil penelitian Karsudi dkk. (2010) menunjukkan pada kemungkinan pengembangan ekowisata di Kepulauan Yapen Provinsi Papua terutama feasibilitas lokasi

sebagai penyedia layanan wisata, peran penduduk dan konservasi tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

Fokus penelitian serupa dilakukan Asso (2010) dalam mengkaji potensi pengembangan Lembah Baliem sebagai destinasi ekowisata. Meskipun terdapat kata berkelanjutan pada judul publikasi, namun penekanan penelitian lebih pada kemungkinan pengembangan ekowisata dilihat dari keunggulan lokasi, ketersediaan sarana dan upaya pengembangan yang perlu dilakukan. Penelitian dengan focus pada pengembangan ekowisata dilakukan oleh Kurnianto (2008) yang membahas tentang kemungkinan pengembangan ekowisata di Waduk Cacaban, Kabupaten Tegal.

Fokus penelitian ekowisata di Indonesia dengan penekanan pada pelestarian lingkungan dilakukan oleh Atmoko (2009), Ia menemukan kemungkinan keselarasan antara pengembangan ekowisata dengan pelestarian bekantan di Kuala Semboja, Kalimantan Timur. Penelitian dengan sudut pandang keanekaragaman hayati di wilayah ekowisata dilakukan oleh Eprilurahma (2009) tentang studi keanekaragaman amphibi dan reptil di kawasan ekowisata.

Penelitian yang menekankan pada pengelolaan ekowisata dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian sumberdaya alam dilakukan oleh Muherin (2008), penelitian ini menemukan pengembangan ekowisata di wilayah hutan mangrove dapat menjaga keseimbangan antara kelestarian hutan mangrove dengan pendapatan penduduk. Penekanan yang sama pada penelitian Purnomo (2013) menghasilkan kemungkinan pengembangan ekowisata melalui penekanan pada peran pemerintah dan masyarakat selain kelayakan lokasi. Walaupun porsi penekanan pada masyarakat tidak sebanyak pada peran daya dukung alam sebagai potensi wisata, pemerintah memiliki peran cukup signifikan dalam pengembangan

ekowisata. Studi tentang peran masyarakat pada pengembangan ekowisata

dilakukan oleh Aziz (2008) yang menemukan bahwa masyarakat kurang berperan dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Pekalongan khususnya di daerah obyek Wisata Linggo Asri. Berbeda dengan hasil penelitian yang menunjukkan lemahnya peran masyarakat setempat, penelitian yang menekankan pada komunitas lokal sebagai unsur utama dalam ekowisata dilakukan oleh Imran (2012). Hasil penelitian ini menunjukkan peran komunitas sebagai pengelola sekaligus sebagai destinasi utama ekowisata tersebut.

Hal positif dari pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata adalah untuk menghindarkan kendali pengembangan ekowisata dari luar dan memaksimalkan keuntungan untuk mereka (Liu, 1994; Ceballos-Lascurain, 1996, dalam Kontogeorgopoulos, 2005). Konsep yang menekankan pada peran komunitas atau masyarakat lokal sebagai pengelola ekowisata dikenal dengan konsep CBEM (*Community Based Ecotourism Management*). Penelitian Faucat (2002) tentang CBEM di Mexico menemukan konsep CBEM mendukung keberlanjutan lingkungan. di sisi lain, penelitian Hijriati dan Mardiana (2014) menemukan pengelolaan ekowisata dapat meningkatkan kerjasama masyarakat.

Penelitian Scheyvens (1999), menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mengelola ekowisata tidak hanya mencakup keterlibatan (partisipasi), namun masyarakat sendiri yang menjadi pengembang ekowisata sebagai penyedia layanan wisata dan pelestari SDA sebagai daya tarik utama ekowisata (pemberdayaan). Tujuan pengembangan ekowisata adalah pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat berdaya dalam arti menjadi aktor utama dalam pengelolaan ekowisata dan pelestarian SDA.

Perkembangan Pantai Teluk Kiluan Pekon Kiluan Negeri sebagai tujuan ekowisata, melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cikal, pelibatan unsur masyarakat dalam

pengembangan ekowisata merupakan potensi bagi pemberdayaan masyarakat secara umum. Mengingat pengembangan ekowisata telah dilakukan sejak tahun 2007, maka focus penelitian ini membahas tentang analisa pemberdayaan masyarakat yang terjadi seiring dengan pengembangan ekowisata di lokasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Ekowisata berbasis masyarakat*

Menurut World Conservation Union (1996) ekowisata adalah:

*“environmentally responsible, enlightening travel and visitation to relatively undisturbed natural, areas in order to enjoy and appreciate nature (and any accompanying cultural features both past and present) that promotes conservation, has low visitor impact, and provides for beneficially active socioeconomic involvement of local populations (Wood, 2002).”*

Definisi ini menekankan ekowisata merupakan perjalanan wisata yang menjaga keseimbangan antara konservasi dan manfaat sosial ekonomi untuk masyarakat lokal.

Konsep ekowisata merupakan konsep wisata yang berlawanan dengan konsep wisata massa dan perhatian pada wisata lokal (Chambell, 1999; Cochrane, 1996 dalam Kontogeorgopoulos, 2005). Penekanan terhadap peran komunitas dalam mengelola ekowisata dikenal dengan sistem *Community Based Ecotourism* (CBE). Menurut Scheyvens (1999) CBE dapat diartikan sebagai suatu bentuk ekowisata di mana masyarakat lokal memiliki kendali penting dan terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan dan proporsi utama keuntungan kepada komunitas. Istilah CBE juga diperkenalkan oleh Belsky (1999), Fitton (1999), Timothy and White (1999).

Mengacu pada United Nations Environment Programme (UNEP), ekowisata harus memenuhi

komponen: (1) menyumbang pada konservasi keragaman mahluk hidup, (2) menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal, (3) mendukung tindakan bertanggungjawab pada pariwisata dan industri pariwisata, (4) diluncurkan terutama untuk kelompok kecil dan kelompok usaha skala kecil, (5) konsumsi rendah pada barang yang tidak terbarukan, dan (6) penekanan pada partisipasi lokal, kepemilikan dan peluang usaha terutama untuk masyarakat

lokal. Ekowisata mengacu pada peraturan UNEP menekankan pada partisipasi masyarakat lokal dan manfaat pariwisata yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Artinya, ekowisata menekankan pada pengelolaan dari, oleh, dan untuk masyarakat lokal bukan untuk usaha besar dari luar masyarakat tersebut.

Menurut buku pedoman "Prinsip dan Kriteria Ekowisata berbasis masyarakat dari Direktorat Jendral Pengembangan Destinasi Wisata tahun 2009" aspek kunci ekowisata adalah (1) jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat (vs *mass tourism*), (2) pola wisata ramah lingkungan (nilai konservasi), (3) pola wisata ramah budaya dan adat setempat (nilai edukasi dan wisata), (4) membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (nilai ekonomi), (5) modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar (nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi), serta (6) ekowisata dan konservasi.

Unsur konservasi masih kuat dan juga meliputi konservasi budaya. Lingkup wisata terbatas sebagai lawan dari konsep *mass-torism*. Keterbatasan lingkup wisata ini dapat berarti pembatasan jumlah pengunjung, waktu kunjungan atau akses terhadap sumberdaya sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi di lingkungan ekowisata. Unsur pendidikan untuk pengunjung sebagai bagian dari upaya konservasi alam dan budaya dan lingkup wisata terbatas. Unsur peran masyarakat terbatas pada partisipasi bahkan pada Buku Pedoman Ekowisata masyarakat merupakan bagian dari penerima manfaat.

Hadi (2007) menyatakan bahwa prinsip-prinsip ekowisata adalah: meminimalkan dampak, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, memberikan pengalaman positif baik kepada turis (*visitors*) maupun penerima (*host*) dan memberikan manfaat, dan keberdayaan masyarakat lokal. Unsur keberdayaan masyarakat menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam pengembangan ekowisata.

Mengacu pada konsep-konsep di atas, pelaksanaan ekowisata dapat dikatakan berbasis masyarakat jika pelaksana dan pengambil manfaat utamanya adalah masyarakat *vis a vis* pengelolaan oleh swasta atau pemerintah, menekankan pada kesesuaian dengan daya dukung masyarakat *vis a vis* wisata massa, memberikan unsur pendidikan kepada masyarakat, dan memberikan dampak keberdayaan bagi masyarakat. Konsep masyarakat mengacu pada masyarakat lokal atau masyarakat di sekitar lokasi pengembangan ekowisata.

### **Pemberdayaan sosial dalam ekowisata**

Pemberdayaan masyarakat menurut Friedmann (1992) meliputi pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, pemberdayaan psikologis dan pemberdayaan politik. Keempat jenis pemberdayaan tersebut mengacu pada ranah pemberdayaan yang dilakukan, apakah di ranah politik, ekonomi, psikologis atau sosial.

Scheyvens (1999) mengadopsi pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan Friedmann (1992) pada pemberdayaan masyarakat dalam ekowisata. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi mengarah pada pencapaian ekonomi pada komunitas lokal yang ditunjukkan dengan pendapatan tunai, perbaikan sarana rumah/masyarakat karena ekowisata. Pemberdayaan psikologi mengarah pada peningkatan kepercayaan diri di masyarakat local karena keunikan dan kelebihan budaya serta sumberdaya alam mereka dihargai oleh pihak luar. Pemberdayaan politik mengarah pada peningkatan posisi tawar setiap pihak dan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan

keputusan terutama untuk kelompok perempuan, anak, atau kalangan yang kurang mendapat akses pada pengambilan keputusan sebelum adanya ekowisata. Pemberdayaan sosial mengacu pada peningkatan kohesi sosial dan harmoni di dalam masyarakat dan keluarga karena adanya ekowisata, pendapatan ekonomi dari ekowisata digunakan untuk membangun sarana sosial seperti sekolah atau memperbaiki jalan. Mengacu pada ranah pemberdayaan Friedman, pemberdayaan ekonomi merupakan ranah pemberdayaan yang paling mendapatkan perhatian dalam pengembangan ekowisata di Indonesia dilihat dari panduan pengembangan ekowisata Indonesia (2009).

Salah satu bentuk pemberdayaan yang sering digunakan dalam melihat dampak sosial ekowisata adalah pemberdayaan sosial. Penelitian dengan fokus pada pemberdayaan sosial dilakukan oleh Pleno (2006), yang melihat pemberdayaan perempuan di Filipina. Pleno melihat peran organisasi masyarakat, LSM, dan pemerintah dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Meskipun penekanan penelitian Pleno masih pada pemberdayaan sosial, analisis pemberdayaan di bidang lainnya juga dilakukannya seperti bidang psikologis dan politik yang menekankan hasil pemberdayaan pada peningkatan kepercayaan diri pada perempuan, dan pemberdayaan politik yang ditunjukkan lewat peningkatan posisi tawar perempuan di masyarakat dan keluarga.

Pemberdayaan sosial karena ekowisata ditandai dengan: penguatan kelompok masyarakat termasuk kelompok anak muda dan perempuan, hasil kedatangan wisatawan digunakan untuk pendanaan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat terutama kalangan yang biasanya tidak tersentuh oleh program pembangunan seperti perempuan, anak dan penduduk miskin. Scheyvens (1999). Hasilnya adalah adanya pembangunan sarana air bersih dan hasil lainnya yang dapat dinikmati di tingkat lokal.

Pemberdayaan dianggap gagal jika menghasilkan pengalihan fungsi tanah adat, kejahatan, pengemis, persepsi kegaduhan,

prostitusi dan tidak adanya pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata (Sopeld dan Birtles, 1996; Mansperger, 1993; Rudkin & Hall, 1996, dalam Scheyvens, 1999). Scheyvens (1999) berpendapat pemberdayaan sosial tidak akan terwujud jika pengelolaan ekowisata yang dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah tidak melibatkan masyarakat lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di objek Wisata Teluk Kiluan yang secara administrasi termasuk dalam wilayah Pekon (desa) Kiluan Negri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus (Bappeda Tanggamus, 2008). Keseluruhan layanan wisata di Teluk Kiluan dilakukan oleh masyarakat Pekon Kiluan Negri, oleh karenanya lokasi penelitian dilakukan pada masyarakat di Pekon Kiluan Negri.

Menurut dokumen resmi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2007), kawasan Pantai Teluk Kiluan termasuk dalam kawasan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Berbasis Ekowisata di Kabupaten Tanggamus. Luas area ekowisata sekitar 3.232 ha dengan ketentuan wilayah luas daratan 2.066,20 ha dan luas wilayah perairan 1,166 ha. Wilayah perairan ekowisata meliputi seluruh kawasan lamun dan terumbu karang yang ada di Pulau Kiluan serta perairan Teluk Kiluan yang merupakan jalur migrasi mamalia laut atau lumba-lumba. Lokasi penelitian sekaligus memberikan definisi masyarakat lokal, masyarakat Pekon Kiluan Negri termasuk perempuan dan anak.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan penggambaran wilayah ekowisata bersama masyarakat. Informan dan informan dipilih dengan menggunakan teknik *snow-balling*. Waktu pengumpulan data dilaksanakan pada pertengahan Mei-Juni tahun 2015. Pemilihan waktu penelitian didasarkan pada waktu kunjungan wisatawan dan kemudahan akses laut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Perkembangan ekowisata di Pekon Kiluan Negri*

Pengembangan ekowisata di wilayah ini secara khusus diprakarsai oleh LSM Cikal yang bergerak di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2008, LSM Cikal mengajukan kegiatan pengelolaan ekowisata dengan melakukan pendampingan pada masyarakat, pendataan dan pengadaan sarana wisata serta menyediakan jasa pemandu wisata. Kegiatan yang diajukan oleh LSM Cikal seiring dengan penetapan wilayah Pantai Teluk Kiluan dalam rencana pengembangan ekowisata oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Terdapat tiga pantai yang menjadi lokasi di Pekon Kiluan Negri, satu laguna dan satu hutan mangrove dan terdapat sembilan *cottage*, dan beberapa toko kelontong. Terdapat 5 rumah untuk *homestay* yang, 10 perahu sewaan, 9 penyewa perlengkapan *diving* dan *snorkeling*. Pendapatan dari wisata diperoleh dari biaya *tour* lumba-lumba Rp. 300.000, -, tiket ke Pantai Kiluan sebesar Rp. 10.000, -, dan tiket masuk ke laguna Rp. 5.000, dan pemandu wisata Rp. 50.000, - untuk 5 pengunjung. Biaya tiket diberikan kepada pemandu wisata, pemilik perahu, pemilik penyewaan *live jacket* dan kas desa.

Sampai saat pengambilan data lapangan belum tersedia data statistic mengenai pencatatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Teluk Kiluan oleh pengelola objek wisata. Menurut Sekretaris Desa, estimasi pengunjung di Teluk Kiluan setiap minggu berada pada kisaran 75 orang, hal tersebut terjadi pada saat *weekend*. Pada hari – hari menjelang *long weekend* atau liburan sekolah minat kunjungan setiap harinya dapat mencapai 500 orang per hari. Berdasarkan data wawancara yang sudah di lakukan oleh peneliti, rata rata wisatawan yang datang ke Teluk Kiluan berasal dari luar Lampung.

Hasil wawancara dengan wisatawan menunjukkan bahwa pengunjung datang ke Teluk Kiluan umumnya melakukan kegiatan wisata selama *2 Day 1 Night*. Sebagian besar adalah kunjungan tipe *group*, adapun kunjungan ke

Teluk Kiluan biasanya menggunakan agen perjalanan wisata dan dilakukan secara mandiri.

Berdasarkan jumlah pengunjung dan pola kunjungan wisata, Teluk Kiluan telah berkembang menjadi *mass-tourism* terutama saat *long-weekend* atau libur sekolah. Pengelola tidak memiliki mekanisme untuk menyaring dan mengurangi pengunjung. Di benak pengelola peningkatan pengunjung diartikan sebagai keberhasilan pengembangan wisata di Teluk Kiluan.

### **Pemberdayaan sosial di wilayah Pekon Kiluan Negri**

Analisis pemberdayaan sosial mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh Scheyvens (1999) meliputi:

#### **a. Partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekowisata**

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Pekon Kiluan Negri ditandai dengan keikutsertaan LSM Cikal dalam setiap tahap pengembangan ekowisata. Keterlibatan LSM Cikal diakui oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Investasi Promosi dan Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Tenggamus, Provinsi Lampung. Hampir semua kegiatan pengembangan ekowisata di lokasi melibatkan LSM Cikal sebagai mitra, kecuali kegiatan pembinaan populasi dan habitat penyu yang berkerja sama dengan CV Srikandi utama pada Tahun 2007.

LSM Cikal sendiri pada awalnya berpusat di Kota Lampung dan kemudian mengarahkan fokus kegiatan pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di Pekon Kiluan Negri. Terdapat 10 orang anggota LSM terdiri dari tiga orang berasal dari Lampung dan 7 orang merupakan warga Pekon Kiluan Negri. Saat penelitian dilakukan seluruh anggota LSM tinggal di Pekon Kiluan Negri. Komposisi pengurus dan keanggotaan LSM Cikal menunjukkan adanya pelibatan masyarakat Pekon Kiluan Negri.

Upaya pemerintah hanya melibatkan masyarakat lokal dengan LSM Cikal sebagai mitra belum memenuhi unsur partisipasi masyarakat secara umum. Anggapan ini ditunjukkan oleh beberapa informan dengan kategori bukan anggota LSM Cikal, bukan pemerintah desa, dan bukan tokoh masyarakat atau tokoh nelayan. Mereka merasa tidak pernah dilibatkan bahkan tidak mengetahui program-program apa saja yang pernah pemerintah Kabupaten Tenggamus atau Pemerintah Pusat lakukan di Pekon Kiluan Negeri lakukan untuk pengembangan dan pengelolaan ekowisata. Anggapan yang sama juga diungkapkan informan kategori perempuan yang tidak terlibat dalam PKK atau tidak memiliki hubungan kedekatan dengan LSM Cikal, mereka juga merasa tidak pernah dilibatkan. Mereka memandang aktivitas wisata hanya sebagai kunjungan wisatawan ke Pantai Teluk Kiluan atau orang yang datang untuk melihat lumba-lumba.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan menyepakati Peraturan Pekon tentang perlindungan sumberdaya lain di wilayah Pekon Kiluan Negeri. Pengembangan ekowisata yang berjalan beriringan dengan konservasi wilayah menghasilkan kesepakatan di tingkat Pekon yaitu Peraturan Pekon Kiluan Negeri No. 04/07PD/P/0.2.2013 Tentang Larangan Menangkap Ikan/ Satwa Laut dengan Menggunakan Panah, Racun dan Bahan Peledak. Peraturan ini dibuat pada rapat desa yang difasilitasi oleh LSM Cikal. Menurut informan, pertemuan dihadiri oleh kurang lebih 30 orang terdiri dari 25 laki-laki dan 5 perempuan, tidak ada anak terlibat dalam pertemuan tersebut. Perempuan terlibat pasif dalam kegiatan dan lebih banyak berperan dalam persiapan acara dan penyedia konsumsi dalam pelaksanaan pertemuan.

Peraturan Pekon dibuat dengan aturan yang mengikat pada seluruh warga Pekon Kiluan Negeri. Penetapan sanksi ditetapkan bersama dan penegakan aturan dilakukan oleh aparat desa bekerjasama dengan LSM Cikal.

Sampai saat penelitian dilakukan, peraturan dianggap efektif mengurangi penggunaan bahan peledak dan racun oleh masyarakat pekon. Ketakutan akan sanksi yang disepakati bersama menjadi alasan kepatuhan terhadap peraturan pekon tersebut. Kepatuhan terhadap peraturan pekon ini juga mendorong masyarakat untuk bersama – sama mencegah terjadinya penangkapan lumba-lumba dan ikan hias atau penggunaan peledak oleh nelayan dari luar wilayah Pekon Kiluan Negeri. Informan menyampaikan jangan sampai ikan yang mereka jaga ditangkap oleh pihak di luar masyarakat pekon. Menurut Ketua LSM Cikal, peraturan Pekon tersebut dilaksanakan karena dirasa dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan keberadaan ikan dan lumba-lumba sebagai daya tarik wisata. Berdasarkan sudut pandang masyarakat, mereka mau berperan dalam pertemuan karena didorong oleh penurunan hasil tangkapan ikan dan peningkatan pendapatan dari datangnya wisatawan. Ini menunjukkan partisipasi aktif masyarakat terutama laki-laki dalam menegakkan aturan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata tampak dari adanya aturan pengelolaan uang hasil usaha wisata. Aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pekon Kiluan Negeri tersebut disusun dalam rapat desa dan menyepakati besaran tarif sewa perahu, tiket, dan alokasi untuk Pekon. Aturan tersebut dinilai mengurangi penghasilan bagi pemilik perahu dan penyewa alat-alat *snorkeling* namun dinilai baik oleh aparat desa dan masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam penyediaan layanan wisata.

Partisipasi masyarakat lokal dalam penyediaan layanan wisata diamati dari siapa penyedia layanan wisata yang ada di wilayah Pekon Kiluan Negeri. Berdasarkan pengamatan, jenis layanan wisata yang dilakukan di wilayah Pekon Kiluan Negeri adalah pemungutan tiket masuk, penyewaan perahu, jasa pemandu wisata, pedagang makanan, pedagang kelontong, penyewaan

alat *diving* dan *snorkeling*, *homestay* dan *cottage*. Penyedia layanan wisata tersebut dapat diamati dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Layanan Wisata Berdasarkan Jumlah dan Pemilik Layanan

No.	Layanan wisata	Jumlah		Pemilik	
		Lokal	Luar	Laki-laki	Perempuan
1	<i>Homestay</i>	5	0	5	0
2	<i>Cottage</i>	7	2	9	0
3	Penyewaan alat <i>snorkeling</i> dan <i>diving</i>	7	2	9	0
4	Pemandu wisata	10	0	10	0
5	Pedagang makanan	2	0	0	2
6	Pedagang kelontong	4	0	2	2
7	Penyewaan perahu	10	0	10	0
8	Penjaga tiket	4	0	4	0

Sumber: diolah dari hasil wawancara, 2015

Berdasarkan tabel 1, komposisi penyedia layanan wisata dapat disimpulkan hingga saat penelitian dilakukan bahwa penyedia layanan wisata sebagian besar masih dilakukan oleh warga Pekon Kiluan Negri. Komposisi pengelola berdasarkan jenis kelamin masih menunjukkan dominasi laki-laki. Hal ini juga disebabkan oleh pemahaman bahwa pemilik *homestay* atau *cottage* adalah kepala keluarga yang artinya laki-laki meskipun pengelola utamanya perempuan. Pekerjaan di laut seperti menyewakan perahu dan menjadi pemandu wisata masih dianggap sebagai pekerjaan laki-laki dan tidak dapat diakses oleh perempuan.

Pemilik *homestay*, *cottage*, dan penyewaan alat *snorkeling* dan *diving* serta pedagang kelontong besar dilakukan oleh penduduk yang termasuk kategori mampu oleh masyarakat setempat. Layanan wisata yang dapat dilakukan oleh penduduk miskin dan perempuan adalah berdagang makanan, pedagang kelontong dalam skala kecil. Pemandu wisata dilakukan oleh pemuda sedangkan penyewaan perahu oleh nelayan yang memiliki perahu.

Salah satu aktivitas dalam ekowisata adalah pendidikan bagi pengunjung dan masyarakat. Dari sisi pelaksana fungsi pendidikan, LSM Cikal masih berperan sebagai pemberi layanan pendidikan utama bagi masyarakat dan pengunjung. Sarana pendidikan yang dibangun dari program pemerintah (lihat lampiran) untuk fungsi pendidikan lebih banyak digunakan oleh LSM Cikal. Masyarakat lain di luar anggota LSM Cikal menggunakan fasilitas tersebut jika ada pertemuan saja. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan pada pengunjung hanya dilakukan oleh pemandu wisata dalam bentuk pemberian informasi berupa: tidak membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut, informasi seperlunya mengenai jenis ikan yang ada di lokasi *snorkeling*, peringatan untuk tidak merusak terumbu karang, dan tidak membawa karang laut sebagai *souvenir*.

#### b. Alokasi hasil pengembangan ekowisata

Sebelum tahun 2008, pendapatan masyarakat Sebagian besar berasal dari kebun dan menangkap ikan. Setelah Tahun 2008, beberapa warga merintis usaha di bidang ekowisata seperti: membangun *cottage*, menyewakan perahu, menjadi pemandu wisata, berjualan makanan di sepanjang pantai, membuka toko kelontong dan penjualan *souvenir*. Secara umum terdapat peningkatan sumber pendapatan masyarakat setelah pengembangan ekowisata. Peningkatan pendapatan per individu atau keluarga diperoleh dari peningkatan hasil penjualan di toko kelontong dan warung makanan, pendapatan dari penyewaan *homestay*, *cottage*, perahu, peralatan *diving* dan *snorkeling* dan jasa pemandu wisata. Pendapatan umum diperoleh dari bantuan pemerintah dan penjualan tiket masuk pantai dan laguna.

Secara individual di tingkat masyarakat, peningkatan kesejahteraan ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan, kemampuan memperbaiki rumah, kemudahan melalui masa



paceklik penangkapan ikan, dan kemampuan menyekolahkan anak. Sebagian besar keuntungan diakses oleh masyarakat yang telah berkecukupan sebelum adanya pengembangan wisata yaitu masyarakat yang memiliki modal untuk memperbaiki rumah dan mendapatkan pendapatan dari menyewakan kamar (*homestay*), pemilik perahu, dan pemilik perlengkapan *diving* serta *snorkeling*. Masyarakat yang tidak memiliki modal besar mendapatkan manfaat ekonomi dengan berjualan, bekerja pada pemilik *homestay* untuk menyediakan makanan untuk tamu, bekerja di *cottage* dan menjadi awak kapal. Informan pada kalangan ini menyatakan bahwa mereka mendapatkan peningkatan pendapatan setelah tahun 2008.

Pemberdayaan sosial ditandai dengan alokasi hasil pengembangan ekowisata digunakan untuk pendanaan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat terutama kalangan yang biasanya tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan seperti perempuan, anak dan penduduk miskin (Scheyvens, 1999). Alokasi pendapatan umum dari bantuan pemerintah dalam bentuk pengadaan dan sosialisasi jika diamati pada lampiran menunjukkan bahwa dari 26 kegiatan hanya dua yang ditujukan secara khusus untuk LSM Cikal sedangkan 24 lainnya untuk masyarakat umum. Ini menunjukkan pengembangan ekowisata memberikan manfaat pada masyarakat Pekon Kiluan Negri. Namun, berdasarkan pendapat informan, tidak seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari kegiatan pengadaan maupun sosialisasi tersebut. Pada beberapa kegiatan pengadaan seperti pembuatan jalan lingkar desa dan pembangunan dermaga labuh, seluruh informan merasakan manfaat dari hasil pengembangan ekowisata tersebut. Pada kegiatan pengadaan lainnya, hanya sebagian informan yang mengaku menerima manfaat, yaitu: penyediaan pondok informasi pariwisata, pembuatan bronjong, pembuatan MCK, pemasangan listrik tenaga surya, dan

pondok informasi lumba-lumba. Manfaat kegiatan pengadaan kurang dirasakan oleh masyarakat yang merasa tidak dekat dengan LSM Cikal, bukan aparat atau tokoh desa, perempuan bukan anggota PKK dan anak-anak. Masalah yang sama dinyatakan informan untuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah.

Pendapatan lainnya yang diperoleh dari pengembangan ekowisata adalah adanya pendapatan uang tunai dari tiket masuk lokasi wisata Pantai Kiluan dan Laguna. Mengacu pada Peraturan Pekon Kiluan Negri, tarif untuk tour lumba-lumba adalah Rp. 300.000, - dengan pembagian pendapatan untuk masyarakat hanya pada biaya yang dialokasikan untuk kas desa. Uraian persentase dana yang diperoleh dari layanan wisata yang diselenggarakan di Pekon Kiluan Negri dijelaskan di tabel 2. Dana pengelola masuk ke pengelola wisata atau agen perjalanan atau ke pemilik *cottage* dan *homestay* jika pengunjung tidak dikelola oleh agen perjalanan wisata.

Tabel 2. Sumber Pendapatan dan Peruntukan Pendapatan

No.	Sumber Pendapatan	Peruntukan (%)	
		Penyedia layanan	Dana Masyarakat
1	<i>Homestay</i>	100	0
2	<i>Cottage</i>	100	0
3	Penyewaan alat <i>snorkeling</i> dan <i>diving</i>	100	0
4	Pemandu wisata	100	0
5	Pedagang makanan	100	0
6	Pedagang kelontong	100	0
7	Penyewaan perahu	80	10
8	Tiket	0	100

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 2015

Berdasarkan tabel 2 di atas, alokasi hasil pengembangan ekowisata sebagian besar hanya diterima oleh penyedia layanan wisata, sedangkan masyarakat umum dapat merasakannya jika pemerintah desa

mengalokasikan pendapatan tersebut untuk penyediaan fasilitas layanan umum (Scheyvens, 1999). Masyarakat dapat mengakses dan menerima manfaat dari penyediaan sarana umum oleh pemerintah dan sebagian mendapatkan manfaat dalam bentuk pengetahuan, pengalaman dan pendapatan dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Adanya bagian dari masyarakat yang tidak dapat mengakses manfaat pengembangan ekowisata menunjukkan indikasi perlunya upaya-upaya untuk pemerataan akses terhadap manfaat dari hasil pengembangan ekowisata.

### c. Tidak adanya indikasi kegagalan upaya pemberdayaan

Mengacu pada pendekatan yang dikemukakan oleh Scheyvens (1999), pemberdayaan sosial dapat dianggap gagal jika menghasilkan pengalihfungsian tanah adat, kejahatan, pengemis, persepsi kegaduhan, prostitusi, dan tidak adanya pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata (Sopeld dan Birtles, 1996; Mansperger, 1993; Rudkin & Hall, 1996, dalam Scheyvens, 1999). Kegagalan pemberdayaan social jika terjadi pengelolaan ekowisata yang dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah tanpa melibatkan masyarakat lokal.. Penilaian faktor kegagalan dinilai dalam *focuss group discussion* yang melibatkan 10 perempuan dan 10 laki-laki dengan mengeluarkan unsur LSM dan aparat Pekon. Penilaian dilakukan atas kriteria tidak ada (0), ada tetapi tidak signifikan mempengaruhi kehidupan masyarakat (1) serta ada dan signifikan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Tabel 3. Penilaian Masyarakat Terhadap Bentuk Kegagalan Pemberdayaan Sosial

No.	Bentuk Kegagalan	Penilaian Masyarakat	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pengalihfungsian lahan adat	1	1
2	Kejahatan	1	1

No.	Bentuk Kegagalan	Penilaian Masyarakat	
		Laki-laki	Perempuan
3	Pengemis	0	0
4	Persepsi kegaduhan	1	1
5	Prostitusi	0	0
6	Masyarakat tidak berpartisipasi	1	2
7	Pengelola utama adalah swasta	1	1
8	Pengelola utama adalah pemerintah	1	0

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 2015

Berdasarkan hasil pada Tabel 3 menunjukkan faktor kegagalan akibat tidak adanya partisipasi masyarakat lebih banyak dirasakan oleh perempuan daripada oleh laki-laki. Pemberdayaan sosial pada pengembangan ekowisata di Pekon Kiluan Negri dinilai telah cukup dalam hal pemberdayaan sosial lewat penekanan pada peningkatan partisipasi perempuan dan anak, hal ini terlihat pada skor yang mencapai angka dua poin hanya ada pada satu indikator.

Jika dilihat dari tujuan ekowisata lainnya, terutama pada unsur konservasi (United Nations Environment Programme (UNEP); Hadi, 2005; Wood, 2002) secara umum, di tingkat masyarakat, pengembangan ekowisata dan penetapan wilayah menjadi wilayah konservasi belum mampu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini dilihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan pantai, menjaga dan menambah luas wilayah hutan mangrove, dan penangkapan ikan dilindungi dalam skala kecil. Perubahan signifikan adalah berkurangnya penangkapan lumba-lumba karena peran pengawasan yang dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat. Kesadaran untuk menjaga lumba-lumba sebagai daya tarik wisata membuat masyarakat akan menyalahkan penangkapan lumba-lumba dan melaporkan setiap aktivitas penangkapan lumba-lumba. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan pada kondisi pantai dan hutan mangrove menunjukkan rendahnya kesadaran pelestarian alam. Hal ini dibuktikan dengan pengrusakan mangrove, banyaknya sampah di beberapa tempat. Masih ditemukannya

ikan kerapu jenis dilindungi diperjualbelikan di pasar.

Dari sisi konservasi budaya (Wood, 2002) perlindungan SDA lebih banyak ditemukan karena sifat wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan sifat hewan yang ada sebagai binatang yang dilindungi. Tidak ditemukan konservasi khas dari Teluk Kiluan atau Pekon Kiluan Negri yang ditentukan sendiri berdasarkan penggalian potensi wilayah di luar peraturan di wilayah konservasi.

Penguatan nilai-nilai lokal sebagai hasil dari ekowisata tidak dapat ditemukan. Beberapa catatan untuk penguatan nilai local adalah tidak ditemukannya konservasi budaya yang menonjol dan tidak ditemukannya bentuk adat atau budaya lokal yang dilindungi secara ketat di Pantai Teluk Kiluan. Sampai saat pengambilan data, masyarakat tidak mengeluhkan perilaku wisatawan kecuali jika ada wisatawan pribumi yang tidak mengenakan pakaian dan hal ini belum pernah ditemui.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wisatawan, motivasi kunjungan wisatawan yang datang ke Teluk Kiluan terutama untuk menikmati wisata berupa Lumba-lumba dan Laguna. Perkembangan layanan wisata di Teluk Kiluan menyediakan pilihan bagi wisatawan selain menikmati atraksi lumba-lumba dan laguna yaitu Pantai Pulau Kelapa, Konservasi Mangrove, Pantai Gigi Hiu, *snorkling*, dan *diving*. Tidak ditemukan motivasi pelestarian SDA pada pengunjung perseorangan atau kelompok yang datang untuk tujuan wisata.

Terdapat pengunjung dari kalangan akademisi untuk melakukan penelitian, Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN). Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa/mahasiswi dari Universitas di Lampung yang melakukan PKL atau KKN memberikan pengetahuan tentang ekowisata kepada masyarakat terutama pengetahuan tentang kebersihan pantai, pelestarian terumbu karang, mangrove dan ada yang pernah melakukan penelitian pengelolaan usaha di daerah wisata. Kesadaran fungsi ekowisata sebagai fungsi pendidikan, konservasi lingkungan dan konservasi budaya telah dimiliki oleh pengunjung akademisi ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan secara umum telah ada partisipasi masyarakat, ada alokasi hasil pengembangan ekowisata untuk masyarakat dan penilaian positif dari masyarakat untuk unsur kegagalan. Partisipasi masih belum melibatkan perempuan, anak dan unsur masyarakat yang tidak terlibat dalam LSM, bukan aparat desa dan tokoh desa serta bukan penyedia layanan wisata.

Keterbukaan alokasi hasil pengembangan ekowisata juga masih ditanyakan peruntukannya oleh masyarakat pada kelompok ini. Ini menunjukkan masih diperlukannya pelibatan masyarakat secara menyeluruh dan keterbukaan pengelolaan dana hasil pengembangan ekowisata.

## DAFTAR ACUAN

- Asso, B., I.A. Manuaba, dan I.N. Sunarta. 2010. Kajian Strategis Pengembangan Potensi Ekowisata di Lembah Baliem sebagai Suatu Alternatif Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan, *Ecotrophic*. 4 (1): 31 – 37.
- Atmoko, T. 2010. Strategi Pengembangan Ekowisata pada Habitat Bekantan (*Nasalis Larvatus* Wurmb.) Di Kuala Samboja, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* Vol. VII No. 4: 425-437, 2010
- Aziz, A. 2008. Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Pekalongan, Skripsi Pada Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Unpub.*

- Belsky J. 1999. Misrepresenting Communities: The Policy of Community-Based Rural Ecotourism in Gales Point Manatee. Belize, Rural Sociology 1999;64 (4): 641–66.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia, 2009. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta.
- Eprilurahman, R., M.F. Hilmy dan T.F. Qurniawan. 2009. Studi Keanekaragaman Reptil dan Amfibi di Kawasan Ekowisata Nggoa Sri, Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Berk. Penel. Hoyati: 15 (9-L-97). 2009
- Fitton, M. 1996. Does Our Community Want Tourism? Examples from South Wales in M.F. Price (ed.) *People and Tourism in Fragile Environment*. Wiley. Chichester.
- Foucat, V.S.A. 2002. Community-based ecotourism management moving towards sustainability, in Ventanilla, Oaxaca, Mexico *Ocean & Coastal Management* 45 (2002) 511–529
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell. Cambridge.
- Hadi, S. P. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hijriati, E. dan Mardiana, R. 2014. Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Desember 2014, hlm: 146-159
- Imran, A.N. 2012. Identifikasi Kapasitas Komunitas Lokal dalam Pemanfaatan Potensi Ekowisata bagi Pengembangan Ekowisata di Kawah Cibuni. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, Vol. 23 No. 2, Agustus 2012, Hlm. 85 – 102.
- Karsudi, R.S., dan H. Kartodihardjo. 2010. *Strategi Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua*, JMHT Vol. XVI, (3): 148–154, Desember 2010
- Kontogeorgopoulos, N. 2005. Community-Based Ecotourism in Phuket and Ao Phangnga, Thailand: Partial Victories and Bittersweet Remedies. *Journal of Sustainable Tourism*. 13.1 (2005): 4-23.
- Kurnianto, I.R. 2008. *Pengembangan Ekowisata (Ecotourism) di Kawasan Waduk Cacaban Kabupaten Tegal*, Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. *Unpub.*
- Muhaerin, M. 2008. *Kajian Sumberdaya Ekosistem Mangrove untuk Pengelolaan Ekowisata di Estuari Perancak, Jembrana, Bali*. Skripsi pada Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. *Unpub.*
- Pleno, M.J.E. (2006). *Ecotourism Project and Women Empowerment: A Case Study in The Province of Bohol, Philippines*. *Forum of International Development Studies*, December, 2006.
- Purnomo, H., B. Sulistyantara dan A. Gunawan. 2013. *Peluang Usaha Ekowisata di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Jawa Timur*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 10 No. 4 Desember 2013, Hal. 247 - 263
- Scheyvens, R. 1999. Case study Ecotourism and The Empowerment of Local Communities., *Tourism Management* 20 (1999) 245-249.
- Tymothy, D. and White K. 1999. *Community Based Ecotourism Development on the Periphery of Balize*. *Current Issues in Tourism* 2. 226-42.
- Wood, M.E. 2002. *Ecotourism: Principle, Practices and Policies for Sustainability*. United Nations Environment Programme (UNEP) Division of Technology Industry and Economics. The International Ecotourism Society. United Nations Publication. USA.